

## **Evaluasi Program RESPEK dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo**

**Muhammad Sawir<sup>1</sup>, Anirwan<sup>2</sup>, Susilawaty<sup>3</sup>, Zdrak Awan Maradona<sup>4</sup>**

<sup>1,3</sup> Universitas Yapis Papua

<sup>2</sup> Universitas Pancasakti Makassar

<sup>4</sup> Bappeda Kabupaten Yahukimo

*Corresponding Author: [sawirmuhammad103@gmail.com](mailto:sawirmuhammad103@gmail.com)*

Received 20 October 2023 ☐ Revised 06 Desember 2023 ☐ Accepted 21 Desember 2023

### **ABSTRACT**

Penelitian ini mengkaji evaluasi Program RESPEK dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Yahukimo dengan mengkaji dampaknya terhadap masyarakat Kampung. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian tersebut dianalisis melalui beberapa tahapan yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program RESPEK yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2007-2011 belum berjalan optimal dan belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam mengentaskan masyarakat miskin kampung Yahukimo, hal tersebut dapat dilihat dari evaluasi input menunjukkan bahwa anggaran perencanaan, pelatihan, dan perbaikan transportasi belum dapat direncanakan penggunaannya dengan baik; evaluasi proses menunjukkan bahwa kurangnya pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga anggaran program yang diterima dibagi-bagi kepada masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program RESPEK belum bisa dikatakan berhasil karena masyarakat Kampung mengakui belum siap menerima dana dari program tersebut. Hal ini dijelaskan dengan menguraikan implementasi program berkelanjutan diperlukan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, agar Program RESPEK dapat berkelanjutan dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu meningkatkan sosialisasi, perencanaan kegiatan, serta pendampingan dan pemantauan pelaksanaan program.

**Kata Kunci: Evaluasi, Program RESPEK, Penanggulangan Kemiskinan.**

### **PENDAHULUAN**

Salah satu aspek pembangunan utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah mengatasi masalah rendahnya kesejahteraan rakyat dengan pengertian lain bahwa masalah penanggulangan kemiskinan masih menjadi perhatian utama program-program pembangunan saat ini dan masa yang akan datang, (Winarno 2005). Masalah kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, tetapi juga dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di perkampungan pelosok-pelosok negara Indonesia. Perbandingan masyarakat miskin antara kota dan perkampungan, di kampung jumlah masyarakat miskin lebih besar dari pada di kota. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain letak wilayah Kampung yang terpencil dan menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.

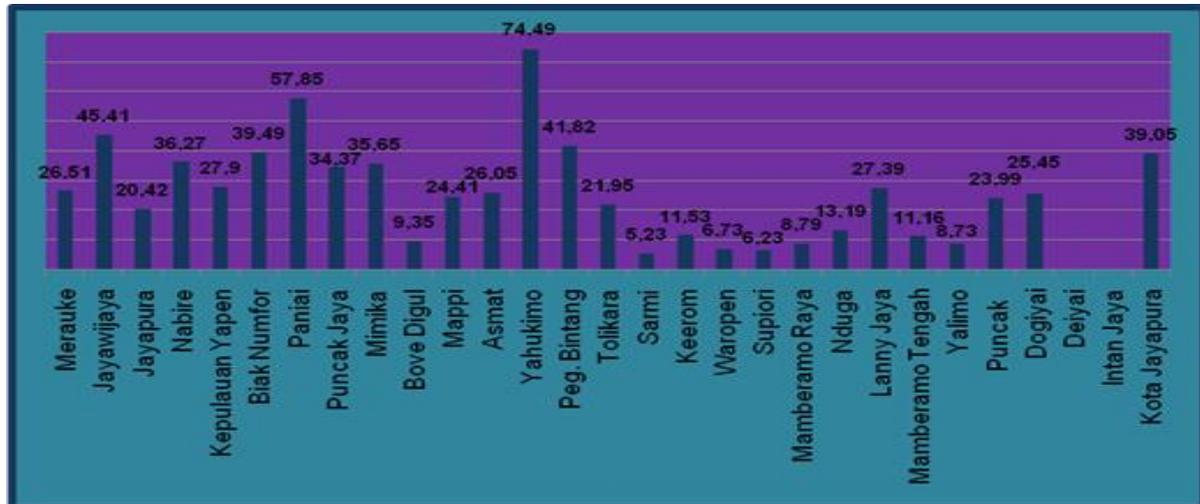
Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari keterbelakangan ekonomi di Kabupaten Yahukimo, pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Program RESPEK dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) yang merupakan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional. Selain itu mendukung masyarakat untuk membangun kemampuan dirinya dimana, Program RESPEK dilakukan sendiri oleh instansi masyarakat yang ada di kampung tersebut (Pemerintah Provinsi Papua, 2008, n.d.).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 tentang Dana Rencana Pembangunan Kampung (RESPEK) Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Pembangunan Kampung selanjutnya disebut RESPEK adalah rencana penetapan kebijakan dan langkah-langkah berisikan program pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya Program RESPEK bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan. Secara khusus sasaran Program RESPEK adalah kelompok penduduk miskin melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan menanggulangi situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Khususnya pasal 15 dan pasal 34 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menetapkan dan mengedalikan/mengarahkan pengelolaan dana penerimaan khusus dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga pemanfaatannya efisien dan berhasil sejalan dengan tujuan dan target yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua. Dengan adanya bantuan Program RESPEK, dana yang diperoleh dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha masyarakat melalui usaha ekonomi produktif sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tingkat kemiskinan penduduk semakin berkurang. Upaya ekonomi produktif dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pendapatan masyarakat Kampung memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Meskipun mengalami pasang surut selama 10 tahun, program pemerintah Provinsi Papua untuk mengatasi kemiskinan telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (1999-2009) cenderung menurun 17,95%, yaitu dari 54,75% di Tahun 1999 menjadi 36,80% di Tahun 2010. Ini berarti tujuan mengurangi proporsi penduduk miskin setengahnya dari Tahun 1990 atau sekitar 22% pada Tahun 2015 merupakan tantangan yang berat. Namun jika mencermati pencapaian satu dekade terakhir, kita melihat penurunan angka kemiskinan menjadi 17,95%. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 36,80%. Meski demikian, proporsi penduduk miskin di Provinsi Papua masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu

sebesar 14,15%. Situasi ini menempatkan Papua pada peringkat ke-33 dari 33 provinsi di Indonesia. Khusus di kabupaten Yahukimo berada pada urutan 13 tingkat kemiskinannya, garis kemiskinan 198.511, jumlah penduduk miskin (ribu orang) 74,49, dengan persentase 49,61%. Berikut persentase penduduk miskin kabupaten/kota propinsi Papua tahun 2010 sebagaimana grafik di bawah ini:



Sumber : Papua Dalam Angka, 2010

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan lebih terkonsentrasi di daerah pegunungan tengah dan perkotaan. Tingginya angka kemiskinan di wilayah pegunungan tengah disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur dan akses pasar. Di sisi lain, kemiskinan di wilayah perkotaan disebabkan oleh banyaknya migran yang masuk tanpa adanya lapangan kerja yang sesuai, karena pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya berdasarkan data yang ada. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks karena keterlibatannya dengan berbagai faktor, termasuk akses terhadap pangan yang cukup, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Yahukimo, perlu melibatkan tiga pihak utama, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai kelompok peduli (seperti LSM, organisasi swasta, universitas, tokoh agama, dan media). Hal ini penting karena faktor utama keberhasilan penanggulangan kemiskinan di kawasan ini terletak pada pembentukan dan pelembagaan jaringan yang mendorong koordinasi, komunikasi, dan kerja sama.

Kabupaten Yahukimo merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinannya mencapai 75 % berdasarkan data statistik Provinsi Papua tahun 2010. Angka kemiskinan yang signifikan ini menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas program RESPEK yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Yahukimo pada tahun 2007 hingga 2011 bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Yahukimo.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui penggunaan survei. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain dengan melakukan wawancara, mengamati partisipan, dan mengkaji dokumen terkait. Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur terhadap informan penelitian. Informan penelitian merupakan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Di Kabupaten Yahukimo yang dianggap memahami dan dapat memberikan informasi sesuai permasalahan yang diteliti. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Sub bagian Umum, Sub bagian keuangan, Sub bagian penyusunan program, Bidang bidang pemerintahan, Bidang penataan dan kerjasama kampung, Bidang Pemberdayaan kelembagaan, Seksi Pembinaan masyarakat, Seksi pengawasan, Seksi penataan kampung, Seksi kerjasama kampung, Seksi pengembangan ekonomi, Seksi kelembagaan kampung, Seksi kelembagaan adat. Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan antara lain pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Program RESPEK Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan**

Untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah Papua meluncurkan program RESPEK yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Program RESPEK yang juga dikenal dengan Rencana Strategis Pembangunan Kampung ini digagas oleh Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2007. Tujuan utamanya adalah mendorong kemajuan Kampung dalam berbagai aspek antara lain pangan dan gizi, pendidikan dasar, kesehatan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan infrastruktur Kampung seperti transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan perumahan.

Tujuan utama Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) adalah mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan potensi dan kapasitas masyarakat, serta peningkatan kemampuan kelembagaan. Program ini bertujuan untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif utama dari konsep pembangunan yang berpusat pada manusia, yang mencakup peningkatan pangan dan gizi, layanan kesehatan, pendidikan, perekonomian kerakyatan, dan infrastruktur dasar. Dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 tentang Dana Rencana Pembangunan Kampung (RESPEK) bahwa program RESPEK bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan intelektual masyarakat Papua. Hal ini dapat dicapai melalui pemberdayaan warga Kampung untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam proses pembangunan di wilayah Provinsi Papua.

Program RESPEK yang diperkenalkan pada periode 2006-2011 sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Namun, hal ini masih sangat bergantung pada intervensi pemerintah. Oleh karena itu, jika Program RESPEK tidak dipahami dan dilaksanakan secara efektif, maka Program RESPEK akan mampu menghasilkan empat outcome pembangunan yang berbeda bagi masyarakat Kabupaten Yahukimo.

*Pertama*, sikap ketergantungan. sikap ketergantungan banyak terjadi pada Program RESPEK yang terutama mengandalkan transfer dana dari Pemerintah Provinsi Papua ke rekening masyarakat Kampung. Alokasi tahunan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta) per Kampung diberikan setiap tahun. Selanjutnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri di tambahkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN ke setiap Kampung dengan nilai mencapai sebesar Rp200-300 juta. Melalui dana PNPM RESPEK-Mandiri, fasilitas Kampung dapat terwujud secara efisien dengan biaya minimal. Namun pendekatan ini secara tidak sengaja memupuk budaya ketergantungan terhadap bantuan (dana) pemerintah. Akibatnya, muncul pola di mana masyarakat mengharapkan dukungan moneter dari pemerintah meskipun tanpa melakukan upaya yang signifikan. Etos kerja masyarakat Kampung menjadi semakin ketinggalan jaman karena masih adanya anggapan kemudahan. Masyarakat Kampung dianggap sebagai penerima hadiah atau keringanan yang menyenangkan dari pemerintah. Pemberian bantuan pembangunan kepada masyarakat Kampung nampaknya bersifat abadi. Namun, skeptisisme muncul dan menganggap klaim tersebut sebagai retorika politik atau janji kosong belaka. Individu menafsirkan ini sebagai jaminan bantuan abadi. Pada akhirnya, Program RESPEK akan melanggengkan rasa tidak berdaya dan rentannya ketergantungan pada pemerintah dalam jangka panjang.

*Kedua*, pemaksaan kerja. Dana Program RESPEK tidak disalurkan secara gratis, melainkan masyarakat dituntut bekerja sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Untuk menerima dana RESPEK, masyarakat yang tinggal di Kampung harus bekerja. Program seperti RESPEK ini seringkali kurang kontekstual karena tidak selaras dengan pola kerja masyarakat setempat.

*Ketiga*, penyalagunaan uang. Meskipun Program RESPEK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dana yang telah dialokasikan terkadang digunakan untuk membeli alkohol, berjudi, dan menutupi biaya lain-lain. Secara keseluruhan, Program RESPEK rupanya telah menimbulkan banyak tantangan dalam kehidupan masyarakat. Implementasi Program RESPEK yang dilakukan masyarakat belum tercapai maksimal.

*Keempat*, Terkadang, laporan palsu dibuat oleh masyarakat sehingga berujung pada situasi di mana masyarakat menipu pemerintah dan sebaliknya. Hal ini menandakan masyarakat belum siap menerima perubahan. Di satu sisi, pengalokasian dana Pemerintah Kabupaten Yahukimo ke Kampung berpotensi menyebabkan konflik di masyarakat dan benturan antar tingkat kewenangan di pemerintahan. Hal ini terjadi ketika penyaluran dana dianggap tidak adil oleh masyarakat. Program RESPEK telah menerapkan mekanisme di tingkat Kampung untuk mengantisipasi potensi ketidakadilan. Namun, mekanisme ini seringkali dimanipulasi oleh masyarakat secara

individu-individu yang berpengaruh di Kampung, baik mereka yang memegang jabatan formal maupun tradisional di pemerintahan. Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya pemahaman dan informasi yang tidak lengkap. Jika permasalahan ini tidak diatasi, besar kemungkinan dana Program RESPEK dapat menimbulkan konflik atau memperburuk konflik yang sudah ada.

Program Rencana Strategis Pembangunan Desa (RESPEK) yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2007. Dalam program ini diberikan dana sebesar 100.000.000 rupiah (seratus juta rupiah) kepada setiap Kampung di wilayah Papua untuk mendukung investasi infrastruktur dan kegiatan perekonomian di Kampung tersebut. Masyarakat Asli Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua termasuk salah satu penerima manfaat dari program ini. Dana ini digunakan untuk berbagai pembenahan Kampung dan peningkatan ekonomi mikro. Program RESPEK yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo adalah Program RESPEK PNPM Mandiri dari tahun 2008-2013 yang merupakan kajian dari evaluasi Program RESPEK di Kabupaten Yahukimo, dari aspek input, proses, dan output, serta dampaknya bagi masyarakat. PNPM RESPEK merupakan salah satu komponen program kerjasama pemerintah daerah yang dikenal dengan RESPEK/Rencana Strategis Pembangunan Kampung, yang didanai oleh dana otonomi khusus Papua dan dimulai pada tahun 2008.

### **Evaluasi Program RESPEK di Kabupaten Yahukimo**

Evaluasi mengacu pada tindakan menilai suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Hal ini melibatkan penilaian yang tidak memihak terhadap suatu intervensi, baik yang masih dalam tahap perencanaan, sedang berlangsung, atau sudah selesai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, evaluasi menggunakan perbandingan input, output, dan hasil aktual dengan rencana dan standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perencanaan ke depan. Selain itu, evaluasi mengacu pada atau mencakup pentingnya suatu kegiatan atau prosedur untuk memastikan nilai sesuatu.

Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 merupakan kegiatan internal dan berkelanjutan yang dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai keluaran program, hasil, dan indikator, yang kemudian akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara berkala dan meliputi analisis data yang diperoleh dari pemantauan. Analisis ini memberikan penilaian terhadap implementasi rencana dan berfungsi sebagai umpan balik berkala bagi pemangku kepentingan.

Menurut Badjuri dan Yuwono (2002: 138) bahwa evaluasi mengacu pada empat indikator pokok yaitu *input, process, outputs dan outcomes*. Indikator input menfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya. Indikator proses menfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator

ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Indikator hasil, menfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Indikator dampak menfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Indikator input menilai apakah sumber daya dan materi yang diperlukan tersedia untuk melaksanakan suatu kebijakan. Indikator tersebut mencakup sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Indikator proses mengevaluasi bagaimana suatu kebijakan diterjemahkan ke dalam layanan langsung kepada masyarakat. Indikator-indikator ini mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi metode yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan publik. Indikator hasil berkonsentrasi pada evaluasi hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Misalnya, indikator hasil dapat berupa jumlah individu yang berhasil berpartisipasi dalam suatu program tertentu. Indikator dampak berpusat pada penilaian dampak yang dialami oleh masyarakat luas atau pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan tersebut. Adapun hasil penelitian berdasarkan teori Badjuri dan Yuwono sebagaimana pembahasan di bawah ini:

#### 1. Evaluasi Masukan (*Input*)

Pada tahun 2007, pemerintah Provinsi Papua memperkenalkan program RESPEK dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Program Rencana Strategis Pembangunan Desa diluncurkan oleh pemerintah. Pada tahun 2008, pemerintah daerah Provinsi Papua melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan nama PNPM RESPEK yang diintegrasikan ke dalam PNPM Mandiri. Dalam skema ini, Pemerintah Daerah Papua memberikan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dalam jumlah besar ke setiap Kampung, dengan jumlah total Rp. 100.000.000, tersebar di 3.923 desa di 388 Distrik. Selain itu, 1.000 staf pendamping atau fasilitator juga ditunjuk untuk mendukung program ini melalui PNPM Mandiri. (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo Tahun 2022, n.d.).

Temuan penelitian pada program RESPEK di Kampung Hereki mengungkapkan bahwa masyarakat berhasil membangun jembatan gantung di sungai Ubahak. Jembatan dengan panjang 27 meter dan lebar 1,5 meter ini selesai dalam waktu 45 hari kerja. Total anggaran untuk proyek ini adalah Rp. 200.000.000, yang mencakup seluruh pengeluaran termasuk peralatan, bahan, transportasi, dan upah pekerja. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Ubalihi adalah transportasi. Hal ini disebabkan perlunya menyewa pesawat untuk mengangkut barang ke TPKD dan TPKK Distrik dan Kampung. Biaya sewa pesawat terbilang mahal, khusus untuk sekali penerbangan menggunakan pesawat AMMA Pilatus berkapasitas 900 KG. TPKK dan TPKD mengalokasikan dana transportasi sebesar Rp. 18 juta – 20 juta untuk keperluan satu kali penerbangan, belum termasuk biaya tambahan seperti penanganan kargo.

Program RESPEK yang telah berjalan sejak tahun 2007 tentunya memerlukan perbaikan agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Papua di masa depan. Meskipun demikian, program ini diterima dengan baik oleh masyarakat Papua. Evaluasi terhadap masukan perencanaan Program RESPEK pada program pemerintah Provinsi dan Kabupaten Yahukimo dengan sepenuh hati memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kampung setempat di wilayahnya. Meskipun pada beberapa daerah hasil evaluasi menunjukkan adanya Kampung tertentu yang merasa terisolir akibat hadirnya Program RESPEK, namun keterisolasian merujuk pada rasa kesendirian, keterpisahan, keterpencilan, dan keterpisahan antar Kampung.

Program RESPEK, yang awalnya dirancang untuk memberdayakan masyarakat Papua yang tinggal di perkampungan, sayangnya gagal memenuhi tujuan utama pemberdayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, meskipun pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana ke seluruh Kampung sebagai bagian dari program RESPEK, namun tidak adanya rencana pembangunan yang komprehensif telah menghambat efektivitas penggunaan dana tersebut. Kedua, Program RESPEK mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi program RESPEK justru cenderung pada penyaluran dana semata.

Di sisi lain, alokasi dana untuk Program RESPEK dapat dianggap sebagai pengeluaran yang sia-sia. Program RESPEK mencakup enam bidang penting, antara lain gizi dan pangan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, infrastruktur, dan tata kelola Kampung. Sayangnya, kurangnya pemahaman masyarakat ditambah dengan kurangnya panduan dalam menyusun strategi dan pemanfaatan dana tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan sumber daya program yang ada. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama dan terpenting, masyarakat Kampung gagal menyusun rencana pemanfaatan dana Program RESPEK secara komprehensif. Selain itu, fasilitator yang diberi tanggung jawab ini kurang memahami tantangan yang dihadapi Kampung di Papua. Yang terakhir, bantuan mendesak dalam bentuk perencanaan yang cermat dan pelaksanaan Program RESPEK yang efektif sangat penting namun masih belum memadai. Akibatnya, potensi RESPEK masih belum dimanfaatkan, meskipun kerangka konseptualnya menjanjikan, sehingga menimbulkan hambatan besar dalam implementasinya.

## 2. Evaluasi Proses (*process*)

Program ini membantu masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menghasilkan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat. Terdapat berbagai faktor yang mendorong terbentuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan Rencana Strategis Pembangunan Perdesaan (RESPEK) di Papua dan Papua Barat. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi geografis provinsi yang bergunung-gunung dan sumber daya alam yang melimpah, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, Temuan penelitian mengungkapkan beberapa permasalahan pada Kapasitas Pembangunan Papua. Pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua, khususnya yang berada di perkampungan, tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam 50 tahun terakhir, meskipun Program

Otonomi Khusus telah diterapkan selama lima tahun. Kedua, lebih dari 40% keluarga di wilayah Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ketiga, sepertiga anak Papua tidak bersekolah. Keempat, sebagian besar Kampung kekurangan fasilitas penting seperti layanan kesehatan, dokter, dan lapangan olah raga. Kelima, angka kematian ibu dan bayi di Papua melampaui rata-rata nasional. Terakhir, Papua memiliki tingkat penularan HIV/AIDS kategori tinggi di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah Papua dan Papua Barat telah meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikenal dengan RESPEK. Pada tahun 2007, Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat pertama meluncurkan RESPEK, singkatan dari Rencana Strategis Pembangunan Kampung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kampung di berbagai bidang seperti pangan dan gizi, pendidikan dasar, kesehatan, pembangunan ekonomi lokal, dan infrastruktur Kampung, termasuk transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan perumahan.

Dalam Program RESPEK, masyarakat mempunyai kesempatan untuk terlibat aktif dalam menentukan kebutuhan dan rancangan kegiatan pembangunan di wilayahnya, dengan bantuan fasilitator. Untuk menilai tingkat pengakuan, pemahaman, partisipasi, dan persepsi masyarakat di Papua dan Papua Barat terhadap Program PNPM RESPEK, PNPM RESPEK bekerjasama dengan BPS menyelenggarakan Survei Evaluasi PNPM RESPEK tahun 2009. Survei ini diintegrasikan ke dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Juli 2009. Survei Evaluasi PNPM RESPEK 2009 yang merupakan bagian dari Susenas mencakup komponen pengetahuan dan partisipasi rumah tangga dalam PNPM RESPEK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kampung secara umum menyambut baik Program RESPEK yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo. Namun permasalahan utamanya terletak pada penyalahgunaan program yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat di Kampung. Masyarakat penerima dana RESPEK ini menunjukkan kemalasan dalam menjalankan kegiatan program. Hal inilah yang terjadi baik pada kelompok masyarakat yang tinggal di Distrik maupun di Kampung.

PNPM RESPEK yang merupakan inisiatif yang lahir dari kerjasama RESPEK/Rencana Pembangunan Kampung Strategis yang didukung dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat telah berjalan sejak tahun 2008 di bawah naungan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang dikenal dengan program PNPM memperluas dukungannya terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada setiap Kampung sebesar Rp. 100 juta. Sungguh menarik semangat dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan dana RESPEK untuk memerangi kemiskinan dengan memberdayakan diri dan memanfaatkan potensi sumber daya pertanian di Kabupaten Yahukimo. PNPM RESPEK menggunakan strategi pembangunan yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan *Community Driven Development*. Pendekatan ini sangat mementingkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program. Program ini menerapkan proses perencanaan langkah demi langkah yang mempertimbangkan kebutuhan dan partisipasi masyarakat, sekaligus menekankan pentingnya transparansi

dan akuntabilitas. Fasilitator menawarkan pelatihan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal.

### 3. Evaluasi Hasil (*Output*)

Program RESPEK melatih para pendamping kabupaten dan Distrik serta memungkinkan Kampung mengakses dana melalui jaringan Bank Papua. Sebab, pemerintah memberikan kepercayaan kepada Bank Papua untuk menyalurkan dana RESPEK. Selain itu, dilakukan juga koordinasi antar instansi teknis tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta memberikan pembekalan bagi para kepala kampung dan lainnya.

Terdapat program pengembangan yang tidak terkait dengan RESPEK namun didanai oleh RESPEK, Contoh program tersebut antara lain pembangunan jalan, jembatan, dan rumah. Kriteria untuk menentukan program mana yang dapat memanfaatkan dana RESPEK juga tidak jelas. Sementara tujuan dana RESPEK adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif yang mendorong perubahan positif dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Ternyata, tahap awal dana RESPEK sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, terdapat pemahaman di kalangan tertentu bahwa dana RESPEK bersumber dari dana otsus sehingga dapat disalurkan kepada setiap warga Papua tanpa dipungut biaya apapun. Mungkin masuk akal bahwa alasan inilah yang mendorong masyarakat tertentu untuk mengalokasikan dana RESPEK yang diterima pada bulan Desember tahun 2007, kepada setiap rumah tangga dalam rangka memperingati hari raya Natal dan Tahun Baru.

Kepala Kampung meminta dana operasional untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RESPEK. Namun ada beberapa kepala Kampung yang memotong Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari dana RESPEK untuk biaya operasional perangkat Kampung. Hal ini menimbulkan dugaan korupsi dalam pendistribusian uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Kampung-Kampung sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam pengelolaan dana.

Dampak lainnya adalah beberapa daerah tidak memiliki pendamping sehingga memaksa pendamping untuk melayani masyarakat di luar wilayah layanan yang ditunjuk. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi para pendamping menyebabkan mereka harus menanggung biaya pendampingan. Oleh karena itu, mereka meminta fasilitas komunikasi untuk memudahkan pelaporan. Permintaan khusus ini datang dari seorang pendamping yang berlokasi di Kabupaten Yahukimo.

Masyarakat Kampung antusias menerima Rp. Dana sebesar 100.000.000 yang menginspirasi sebagian masyarakat yang meninggalkan Kampung untuk kembali dan membantu pembangunan. Pertemuan-pertemuan diadakan untuk merencanakan pembangunan Kampung, dan penduduk Kampung mengambil peran sebagai pekerja dan pemimpin dalam proyek-proyek tersebut. Kondisi yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah kehidupan masyarakat Kampung.

Tidak ada satu pun perangkat Kampung yang memberikan laporan penggunaan dana secara lengkap dan rinci. Mereka hanya mengakui menerima dana tersebut dan menggunakannya, namun kesulitan memberikan penjelasan yang jelas. Informasi yang diberikan hanya berkaitan dengan alokasi untuk pendidikan dan kesehatan, namun disampaikan dengan nada yang tidak menentu. Selain itu, berkat kunjungan Gubernur

dan Wakil Gubernur tersebut, Bupati Yahukimo dan tim terus bekerja keras membangun jalan yang akan digunakan untuk transportasi. Pemerintah daerah membangun jalan raya yang pemeliharannya sempurna, lebarnya cukup, dan tidak ada berlubang.

Kondisi jalan sangat memprihatinkan, baik pengendara roda empat maupun roda dua kerap melintas di sepanjang jalan raya, Namun, ketika ada rencana Gubernur dan Wakil Gubernur mengunjungi salah satu Kampung di Yahukimo, kondisi jalan membaik secara signifikan. Kondisi jalan, jembatan dan gorong-gorong dalam kondisi sangat baik. Akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah, termasuk presiden, wakil presiden, dan gubernur, untuk sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang berjauhan, karena hal ini akan mempercepat kemajuan pembangunan infrastruktur. Dalam kasus Yahukimo, kepala Kampung telah meminta dana RESPEK sebesar Rp. 100 juta, sayangnya jumlah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan menyeluruh di komunitas yang sangat terpencil. Oleh karena itu, kepala Kampung meminta gubernur mengalokasikan satu miliar rupiah untuk setiap Kampung.

Beberapa kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan dalam RESPEK tahap kedua tahun 2008. Karena waktu pelaksanaan Program RESPEK tahap pertama yang relatif singkat, terdapat beberapa kelemahan yang belum terselesaikan. Meskipun proses dan tahapan pelaksanaannya dapat dievaluasi, namun tidak mungkin mengukur apakah kondisi kehidupan masyarakat telah mencapai tingkat keberhasilan tertinggi. Mengukur kemajuan upaya-upaya yang ada saat ini masih memerlukan waktu 25 hingga 50 tahun lagi.

Untuk mempercepat kemajuan pembangunan di Kampung, penting untuk memprioritaskan pemekaran Distrik dibandingkan sekedar pemekaran Kabupaten. Pemerintah mengakui bahwa ada permasalahan lama yang perlu diatasi. Sistem proyek yang ada saat ini hanya memungkinkan masyarakat untuk mengamati pembangunan dibandingkan berpartisipasi aktif di dalamnya. Berbeda dengan negara lain yang pembangunannya dimulai dari masyarakat, pelaksanaan Program RESPEK di Kabupaten Yahukimo dinilai kurang berhasil. Hal ini disebabkan karena masih adanya anggapan masyarakat Kampung bahwa mereka belum siap menerima dana RESPEK karena rincian programnya harus terus dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kesenjangan ini disebabkan oleh relatif rendahnya rata-rata sumber daya manusia masyarakat Kampung dibandingkan daerah lain di luar Papua.

### **Dampak Program Respek Terhadap Masyarakat di Kabupaten Yahukimo**

Program RESPEK dilaksanakan pada akhir tahun 2007 setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat Kampung di 34 lokasi. Dalam pertemuan tersebut disampaikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan disalurkan ke setiap Kampung untuk mendorong percepatan pembangunan Kampung. Implementasi Program RESPEK dalam mendorong pembangunan Kampung pada awalnya mendapat keraguan dari masyarakat. Kejadian di masa lalu dimana individu mengeksploitasi pengaruhnya dan melarikan diri dengan membawa data berharga meninggalkan rasa ketidakpercayaan yang masih ada di kalangan masyarakat Kampung. Namun pandangan mereka berubah ketika masyarakat menerima program ini dengan sepenuh

hati dan merasakan manfaat nyata bagi kemajuan Kampung mereka, khususnya di Distrik Ubalihi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Dampak Program RESPEK yang baru dirasakan masyarakat kampung di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2008. Salah satu dampak dari adanya Program RESPEK dapat dilihat pada aktivitas masyarakat dengan adanya program tersebut pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kabupaten Yokuhimo Dengan Bantuan Program Respek**



Aktivitas masyarakat pada gambar 1 menunjukkan bahwa hasil (*output*) dari Program RESPEK berhasil sesuai rencana awal. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung sehingga pendapatannya meningkat. Hal inilah yang menjadi dampak penerapan Program RESPEK di Kampung-Kampung di Kabupaten Yahukimo terhadap masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku usaha mikro cukup besar. Sebagai pengusaha di bidang pertanian khususnya sektor peternakan, Kabupaten Yahukimo mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Upaya pengembangan koperasi dan UKM bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2008, jumlah koperasi di Kabupaten Yahukimo berjumlah 62 buah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 24 buah koperasi pada tahun 2007. Jumlah 62 buah koperasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu 51 buah Koperasi Unit Kampung dan 11 buah Koperasi Non Unit Kampung (KNUK).

Upaya penguatan koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dilakukan secara strategis dan terorganisir. Upaya-upaya tersebut meliputi: 1) menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung untuk memaksimalkan peluang dan memastikan efisiensi ekonomi, 2) mengembangkan sistem pendukung bagi UMKM untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan memanfaatkan sumber daya lokal dan modal yang tersedia, 3) menumbuhkan kewirausahaan dan meningkatkan keunggulan kompetitif UKM, 4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal. Selain itu, Program RESPEK juga telah melahirkan pabrik tahu dan tempe yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Yahukimo mempunyai minat yang kuat terhadap dunia usaha. Namun, kecintaan mereka terhadap bisnis tidak berkesinambungan. Selain itu, penyebab utama tingginya angka kemiskinan adalah kurangnya pemahaman pengelolaan usaha di dunia wiraswata, terbatasnya akses permodalan, dan penguasaan teknologi. Keuntungan yang diperoleh pengusaha lokal Yahukimo hanya mampu menopang konsumsi mereka dalam jangka waktu singkat. Lemahnya daya bisnis yang disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, menyebabkan masyarakat tidak dapat mewujudkan potensi bisnis yang berbasis sumber daya lokal.

### KESIMPULAN

Program RESPEK yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2007-2011 belum berjalan optimal dan belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam mengentaskan masyarakat miskin kampung Yahukimo. Hal tersebut dapat dilihat dari *Pertama*, evaluasi masukan (input) Program RESPEK berupa anggaran Bantuan Langsung (BLM) Tunia sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima masyarakat menunjukkan kurangnya perencanaan yang tepat dalam penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam merencanakan program secara efektif, termasuk merencanakan penggunaan BLM, merencanakan pelatihan, dan melaksanakan perbaikan jalan. Hal lain, terdapat ruas jalan yang masih rusak sehingga menyulitkan kendaraan roda empat maupun roda dua untuk melintas. *Kedua*, Penilaian terhadap proses Program RESPEK menunjukkan adanya kekurangan dalam pemberian bantuan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga menyebabkan distribusi dana yang dialokasikan di masyarakat tidak merata. Selain itu, para fasilitator kurang memahami tantangan yang dihadapi Kampung-Kampung di Kabupaten Yahukimo. *Ketiga*, evaluasi terhadap hasil (*output*) menunjukkan bahwa Program RESPEK yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa belum siap menerima dana dari RESPEK. Mereka menyoroti perlunya implementasi berkelanjutan dari program-program khusus yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung. Hal ini terjadi karena rata-rata sumber daya manusia masyarakat Kampung relatif rendah. Oleh karena itu, agar Program RESPEK dapat berkelanjutan dan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Yahukimo, maka pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu melakukan penguatan sosialisasi, perencanaan kegiatan, serta pendampingan dan monitoring pelaksanaan program.

### REFERENSI

- Badjuri & Yuwono, 2005, *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2010. *Papua Dalam Angka Tahun 2010*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo, 2014. *Yahukimo Dalam Angka Tahun 2014*.
- Bappenas, 2008. *Rencana Kerja Pemerintah, lampiran buku II peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan*. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Vol.2 (1). 49 – 57.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah*. Jakarta: Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- Dickson. (2014). 10 Negara Termiskin di Dunia. Diakses pada 20 September 2016, diperoleh dari <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-termiskin-di-dunia-pdb-per-kapita/>
- Gema Nias Barat. (2010). Kriteria Dan Batasan Orang Miskin di Indonesia. Diakses 18 September 2016, diperoleh dari <https://gemaniasbarat.wordpress.com/2010/01/17/kriteria-dan-batasan-orang-miskin-di-indonesia/>
- Ginanjart Kartasasmita, 1997. *Kemiskinan* ;Jakarta: Balai Pustaka.
- Hidayat, L. R. (2014). Faktor Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan. Diakses pada 18 September 2016, diperoleh dari <http://laelyrakhmawati.wordpress.com/2014/04/21/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kemiskinan/>
- Ismanto, I.G.N. 1995. *Kemiskinan di Indonesia dan Program IDT*. Center for Strategic and International Studies: Jakarta.
- Maipita, I. (2013). Penyebab dan Dampak Kemiskinan. Diakses pada 18 September 2016, diperoleh dari [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=305856:penyebab-dan-dampak-kemiskinan&catid=25:artikel&Itemid=44](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=305856:penyebab-dan-dampak-kemiskinan&catid=25:artikel&Itemid=44)
- Ndraha, T. 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta Nugroho, R.G. 2006. *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang, model-model perumusan, implementasi dan evaluasi*. Jakarta. Percetakan PT. Gramedia.
- Nugroho, A.T. (2013). Penyebab Kemiskinan di Indonesia serta Dampak yang Ditimbulkan. Diakses 18 September 2016, diperoleh dari <http://alifa-paadanya.blogspot.com/2013/04/penyebab-kemiskinan-di-indonesia-serta.htm>
- Pasandaran, E. 1994. *Hasil penelitian upaya penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende dan Timor Tengah Utara*. Jakarta: Puslitbangnak.
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 38 Tahun 2011 tentang Dana Rencana Pembangunan Kampung (RESPEK).
- Pratiwi, S. (2012). Dampak Kemiskinan. Diakses pada 18 September 2016, diperoleh dari <http://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/>
- Purnomo, Herdaru. (2014). Ini Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak. Diakses pada 21 September 2016, di peroleh dari <http://finance.detik.com/read/2014/04/04/113721/2545349/4/ini-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-miskin-terbanyak>
- Remi, S.S, dkk. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal)*. Edisi Indonesia Inggris. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Setiawan, D. (2010). Kemiskinan: Latar Belakang, Dampak dan Pemecahan. Diakses pada 18 September 2016, diperoleh dari <http://dasesetiawan999.blogspot.com/2010/10/kemiskinan-latar-belakang-dampak-dan.html>

- Sukelele, D.D. 2003 *Pemberdayaan masyarakat miskin di era Otonomi Daerah*. Bekasi: Yayasan Kurnia.
- Tangkilisan, H.N.G. 2003. *Evaluasi kebijakn publik, penjelasan, analisis & transformasi pikiran Nagel*. Yogyakarta. Penerbit Balairung & Co.
- Tarigan, A. 2002. *Konsentrasi kebijakan publik. derektorat kerjasama pembangunan sektoral dan daerah*. Jakarta: Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo (Anggota IKAPI).